



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KUNCI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
PADA BORDER INVESTMENT SUMMIT**

**Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi Daerah Perbatasan  
Jakarta, 3 November 2015**

1. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada era Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan agenda prioritas yang telah ditetapkan yaitu Nawa Cita, dimana amanat Nawa Cita yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini jelas sejalan dengan pembangunan daerah perbatasan yang mengutamakan pembangunan lokasi-lokasi prioritas yaitu kecamatan yang letaknya tepat berbatasan dengan negara tetangga. Dalam rangka mewujudkan daerah perbatasan menjadi kawasan beranda Indonesia sebagai daerah terdepan yang menjadi pintu gerbang segala aktivitas negara dengan negara tetangga.
2. Daerah Perbatasan mempunyai potensi yang luar biasa, baik potensi alam, pariwisata, budaya, perkebunan, tambang dan banyak potensi lainnya, yang pada umumnya belum tergarap secara optimal. Oleh karenanya, pembangunan daerah perbatasan sebagai kawasan beranda negara perlu dilakukan tidak hanya dengan pendekatan keamanan (security approach) yang diimbangi dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), namun perlu dilengkapi dengan pendekatan ekonomi (economy approach) dengan mendorong investasi di daerah perbatasan sesuai dengan potensi dan peluang yang dimiliki, dengan tetap memperhatikan aspek social budaya atau kearifan lokal.
3. Pembangunan daerah perbatasan dengan segala potensinya, jika dimanfaatkan dengan tepat akan dapat meningkatkan daya tarik daerah perbatasan untuk menjadi semacam etalase bagi negara-negara tetangga untuk dapat melihat kekayaan dan keragaman budaya Indonesia, dan sekaligus untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, semua pemangku kepentingan harus terlibat dan berpartisipasi aktif dalam mengambil peran masing-masing, tidak hanya peran pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun juga kalangan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya jelas sangat diperlukan.
4. Kehadiran pemerintah di daerah perbatasan, terutama dalam hal percepatan pembangunan kawasan, mutlak diperlukan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah berkomitmen untuk mempercepat pengembangan daerah perbatasan melalui program Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI), yaitu sebuah upaya mengembangkan dan memberdayakan daerah perbatasan menjadi beranda negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman. Sebagai salah satu program unggulan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, program PKBI dimaksudkan untuk

melakukan percepatan pembangunan daerah perbatasan menjadi pusat perkotaan yang berfungsi bukan hanya sebagai pos lintas batas negara, namun juga sekaligus sebagai pintu gerbang perdagangan internasional untuk kegiatan ekspor dan impor, simpul utama transportasi dengan negara tetangga, dan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

5. Program PKBI tentunya juga harus didukung dan bersinergi dengan program pembangunan lainnya, salah satunya melalui sinergitas dengan program Transmigrasi sebagai salah satu pendukung utama, karena pembangunan transmigrasi dilaksanakan dengan berbasis kawasan yang mempunyai keterkaitan dengan kawasan sekitarnya untuk membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang di dalamnya mempunyai potensi yang sangat besar baik potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya buatan. Saat ini telah dibangun 10 Kota Terpadu Mandiri (KTM), 28 Kawasan Transmigrasi, dan 17 Satuan Pemukiman yang berada di daerah perbatasan, yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan potensi yang ada di daerah perbatasan.
6. Selain itu, melalui program PKBI juga akan dikembangkan potensi yang sudah dimiliki daerah-daerah perbatasan, baik potensi alam, pariwisata, sosial budaya, perkebunan, tambang dan banyak potensi lainnya yang mungkin belum tergarap secara optimal, termasuk untuk meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam mengembangkan investasi di daerah perbatasan. Dengan demikian, tujuan membangun daerah perbatasan menjadi kawasan beranda negara yang maju, sejahtera dan aman dapat terwujud, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan identitas kita sebagai bangsa yang berdaulat.
7. Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah perbatasan, maka terdapat peluang yang besar untuk investasi, untuk mengembangkan dan mengusahakan potensi sumberdaya alam daerah perbatasan, serta dengan mengoptimalkan aset yang sedang dibangun dan dikembangkan pemerintah, seperti sarana dan prasarana dasar, sarana dan prasarana transportasi dan konektivitas antar pulau di daerah perbatasan, serta sarana penunjang lainnya yang akan mendukung pengembangan investasi di daerah perbatasan. Potensi dan aset tersebut merupakan modal awal yang dapat didayagunakan oleh semua pihak, termasuk oleh pihak swasta, yang akan mengurangi biaya awal investasi secara keseluruhan. Peran pihak swasta melalui penyertaan modal, penerapan teknologi, dan manajemen pemasaran, diharapkan sekaligus dapat meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan dan wilayah sekitarnya, yang pada gilirannya dapat mewujudkan daerah perbatasan yang maju, berdaya saing dan aman.
8. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, yang dituangkan ke dalam Buku Profil Potensi Investasi Daerah Perbatasan Indonesia, telah diidentifikasi berbagai peluang usaha dan investasi yang dapat dikembangkan pihak swasta di daerah perbatasan, yang meliputi kegiatan usaha primer, sekunder maupun tersier. Kegiatan usaha ekonomi primer dapat berupa pengembangan pertanian dalam arti luas, termasuk perkebunan dan peternakan, serta pengembangan usaha ekstraktif di bidang perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Sementara usaha sekunder diantaranya meliputi potensi industri rumah tangga dan agroindustri. Sedangkan sektor usaha tersier meliputi jasa pelayanan, jasa konstruksi, dan jasa perdagangan, maupun jasa lainnya yang potensial dikembangkan di daerah perbatasan.

9. Dalam rangka mengembangkan daerah perbatasan, pemerintah telah memberikan insentif yang menarik kepada pihak swasta berupa kemudahan mendapatkan informasi terkait dengan potensi investasi, perizinan, maupun regulasi lainnya. Dengan telah diterbitkannya **paket kebijakan ekonomi jilid I, II dan III** dengan berbagai kemudahan untuk melakukan investasi, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan investasi tak terkecuali di daerah perbatasan, yang merupakan Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam mendukung kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Khususnya untuk daerah perbatasan, perlu dibuat regulasi khusus sebagai perwujudan kebijakan asimetris yang menarik dan memudahkan dunia usaha untuk melakukan investasi di daerah perbatasan.
10. Investasi di wilayah perbatasan, pada akhirnya merupakan upaya strategis untuk mengembangkan perekonomian dengan langkah yang terintegrasi dan sinergis. Selain itu, kita perlu sepakat untuk mengupayakan pencapaian sasaran kebijakan pembangunan di daerah perbatasan dengan perspektif yang lebih positif dan produktif, dengan melengkapi pendekatan yang semula hanya melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan, dengan mengupayakan pendekatan ekonomi melalui pengembangan daerah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, yang pada gilirannya akan berakibat langsung pada meningkatnya keamanan, kesejahteraan, dan sekaligus pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.
11. Dengan diselenggarakannya *Border Investment Summit* ini, saya berharap dapat memulai langkah baru dengan niat baik untuk menjaga keutuhan NKRI, mensejahterakan masyarakat, dan sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan.
12. Akhirnya, dengan sekaligus meluncurkan buku Profil Potensi Investasi Daerah Perbatasan Indonesia, maka dengan memohon ridha Allah SWT, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ***Border Investment Summit Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi di Daerah Perbatasan*** secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berdialog dan berdiskusi demi merumuskan upaya terobosan dan strategis dalam pembangunan daerah perbatasan sebagai kawasan beranda negara Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya yang baik.

**Jakarta, 3 November 2015**  
**Menteri Desa, Pembangunan Daerah**  
**Tertinggal, dan Transmigrasi**

**Marwan Jafar**